

## Relasi Kuasa dan Perjuangan Kesetaraan Gender: Narasi Perempuan Mengelola Pertambangan Minyak *Artisanal* di Sumatera Selatan

Vieronica Varbi Sununianti<sup>1</sup>

Jurusan Sosiologi, Universitas Sriwijaya, Indonesia

### **Abstract**

*This article emphasizes power relations and gender equality dynamics in resource management in the artisanal oil mining sector of South Sumatra. Michel Foucault's perspective on knowledge and power is used to explore how power structures that change women's roles emerge as a result of livelihood shifts from rubber farming to artisanal oil mining. The descriptive qualitative study with live-in assisted in the process of interviewing and observing a number of artisanal oil miners as well as women in Dusun Tue, Musi Banyuasin Regency, South Sumatra. Historically, women were active and equal in economic activities based on rubber farming. However, the emergence of artisanal mining has seen women's roles gradually excluded from productive spaces, especially at mining sites due to perceived "taboos". This exclusion is part of a power strategy that produces gender inequality through normalized social norms. Nevertheless, a critical analysis perspective helps to see the uniqueness of various forms of power and resistance and women's agents to resist such discrimination. Even though they are excluded from mining sites, women remain involved in mining activities through mining partnerships, scavenging for oil spills, and even determining well-drilling locations through the ritual of "meniduri tanah". Women also play an important role in local economic empowerment through micro, small, and medium enterprises, thus continuing to contribute to family and community livelihoods. This study illustrates that power is contested in various contexts. In artisanal oil mining, the relationship between men and women reveals not only structural inequality but also the process of women's struggle over their role in the local economy. Hence, this study provides an important perspective on the role of gender in resource management in the informal sector. Further, economic changes not only increase gender inequality but also enable empowerment and resistance strategies.*

**Keywords :** *Artisanal Oil Mining, Critical Sociology, Gender, Michel Foucault, Power and Resistance, Women Empowerment*

### **Abstrak**

Artikel ini menganalisis relasi kuasa dan dinamika kesetaraan gender dalam pengelolaan sumber daya di sektor pertambangan minyak *artisanal* Sumatera Selatan. Perspektif Michel Foucault tentang pengetahuan dan kuasa berguna dalam menyelidiki bagaimana struktur kuasa yang mengubah peran perempuan muncul sebagai akibat dari pergeseran mata pencaharian dari pertanian karet ke pertambangan minyak *artisanal*. Studi kualitatif deskriptif dengan *live in* membantu dalam proses wawancara dan observasi pada sejumlah penambang minyak *artisanal* juga para perempuan di Dusun Tue, Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan. Awalnya, perempuan aktif dan setara dalam kegiatan ekonomi berbasis pertanian karet. Namun, munculnya pertambangan *artisanal* menjadikan peran perempuan secara bertahap disingkirkan dari ruang produktif, khususnya di lokasi tambang karena anggapan "tabu". Eksklusi ini bagian dari strategi kuasa yang menciptakan ketidaksetaraan gender melalui norma sosial yang dinormalisasi. Namun demikian, perspektif analisis kritis membantu melihat keunikan berbagai bentuk kuasa dan resistensi dan agen perempuan untuk menentang diskriminasi tersebut. Meskipun mereka dieksklusi dari lokasi tambang, perempuan tetap terlibat dalam aktivitas tambang melalui *kongsi* tambang, memulung tumpahan minyak, dan bahkan menentukan lokasi pengeboran sumur melalui ritual "meniduri tanah". Melalui usaha mikro, kecil, dan menengah, perempuan juga memainkan peran penting dalam pemberdayaan ekonomi lokal, sehingga mereka terus berkontribusi terhadap kehidupan keluarga dan komunitas. Studi ini menunjukkan kuasa diperdebatkan dalam berbagai konteks. Dalam pertambangan minyak *artisanal*, hubungan antara laki-

---

<sup>1</sup>vieronica**varbis**@unsri.ac.id

laki dan perempuan tidak hanya menunjukkan ketimpangan struktural, tetapi juga proses pertarungan perempuan membahas perannya dalam ekonomi setempat. Oleh karena itu, studi ini memberikan perspektif penting tentang peran gender dalam pengelolaan sumber daya di sektor informal. Selain itu, perubahan ekonomi tidak hanya meningkatkan ketimpangan gender tetapi juga memungkinkan strategi pemberdayaan dan resistensi.

**Kata Kunci** : Gender, Kuasa dan Resistansi, Michel Foucault, Pemberdayaan Perempuan, Pertambangan Minyak *Artisanal*, Sosiologi Kritis

## Pendahuluan

Pertambangan minyak *artisanal* merupakan jenis pertambangan skala kecil atau biasa disebut “*illegal mining*” (Andrews, 2015; Banchirigah, 2008; Lahiri-Dutt, 2007; Utoyo, 2018; Wagner, 2016), “*informal mining*” (Bansah et al., 2018; Lahiri-Dutt, Alexander, et al., 2014; Spiegel, 2012), ataupun “*public mining*” (Brata, 2018). Pertambangan ini umumnya tanpa izin operasional, berteknologi rendah, padat karya, menghasilkan pendapatan paling penting, dan terkait pertanian di pedesaan (Buxton, 2013). Biasanya aktivitasnya disematkan berkaitan dengan masalah lingkungan, kesehatan, keselamatan, dan sosial (Macdonald et al., 2014).

Praktik penambangan minyak *artisanal* ini menampilkan kompleksitas dinamika sosial terkait peran gender. Umumnya ketimpangan gender kerap terjadi di daerah yang perekonomiannya bersumber pada eksploitasi sumber daya alam. Hal ini tampak nyata di Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan (Kab. Muba Sumsel). Awalnya masyarakat bermata pencaharian sebagai petani karet yang memberikan akses dan kesempatan pada perempuan untuk terlibat dalam perekonomian rumah tangga. Namun, masyarakat desa mengalami perubahan struktur sosial dan ekonomi secara signifikan, khususnya sejak terjadi alih mata pencaharian ke pertambangan minyak *artisanal* di tahun 2013 (Sununianti, 2024). Perempuan yang awalnya berperan penting dalam kegiatan pertanian, kini mengalami pembatasan atas akses dan partisipasi mata pencaharian di pertambangan. Studi literatur ternyata juga menunjukkan bahwa transformasi ekonomi akibat eksploitasi sumber daya umumnya memberi implikasi pada perubahan relasi gender. Umumnya perempuan lebih termasuk kategori rentan terhadap marginalisasi ini (Lahiri-Dutt, 2005, 2011, 2018).

Bagi sebagian besar masyarakat pedesaan, perempuan memainkan peran dalam konteks sosial-ekonomi. Peran perempuan tidak hanya di lingkup rumah tangga, seperti mengenai produksi juga manajemen rumah tangga dan pengelolaan sumber daya lokal. Perempuan juga turut berperan dalam sektor mata pencaharian, khususnya pertanian. Saat bertani karet, perempuan umumnya berperan aktif seperti halnya dengan laki-laki, baik dalam pekerjaan maupun pengambilan keputusan. Akan tetapi, seiring peralihan mata pencaharian ke pertambangan dengan menekankan ciri maskulin turut menyingkirkan peran perempuan secara struktural dan menciptakan ruang sosial yang cenderung eksklusif bagi laki-laki. Hal ini sejalan dengan studi terdahulu yang menunjukkan bahwa di pertambangan dengan skala kecil dan informal, umumnya perempuan berada di pinggiran ekonomi produktif akibat norma sosial yang mendukung segregasi gender di tempat kerja (Buss, 2019; Lahiri-Dutt, 2011; Lahiri-Dutt, Miller, et al., 2014; Moretti, 2006)

Michel Foucault menekankan bahwa kuasa tidak hanya mewujudkan diri secara represif, tetapi juga produktif. Kuasa bekerja melalui norma-norma yang mengatur perilaku sosial dan membentuk apa yang dianggap sebagai “wajar” atau “normal” di suatu masyarakat (Foucault,

1980). Relevansinya dengan studi ini, norma sosial cenderung menganggap kehadiran perempuan di sekitaran lokasi penambangan sebagai tabu. Hal ini adalah salah satu bentuk kuasa produktif yang turut mereproduksi ketimpangan gender. Eksklusi perempuan dari ruang produktif pertambangan *artisanal* telah menunjukkan produksi kuasa bekerja melalui pembentukan wacana sosial mengenai ruang kerja yang “terlarang” bagi perempuan.

Perempuan masih sulit mengakses pekerjaan di pertambangan dan memperoleh manfaat yang setara dengan laki-laki. Keterlibatan perempuan dalam pertambangan *artisanal* bervariasi di berbagai belahan dunia, persentase tertinggi di Afrika sekitar 40%-50%, Amerika Latin 10-20%, sementara di Asia kurang dari 10% (Hilson & Potter, 2003). Sejumlah studi mengenai gender dan pertambangan di wilayah *Global South* pun turut menunjukkan bahwa ketidaksetaraan gender dalam sektor ini sering dipertahankan melalui mitos, kepercayaan, juga norma tradisional, sehingga mempengaruhi peran dan peluang perempuan dalam pertambangan (Arthur-Holmes, 2021; Danielsen & Hinton, 2020; Ibrahim et al., 2020). Jenis pertambangan *artisanal* yang dibahas juga cenderung pertambangan emas *artisanal* di Afrika (Hilson & Maconachie, 2020; Sununianti & Nugroho, 2023b, 2023a; Yankson, 2019).

Studi ini berargumen bahwa bekerjanya kuasa tidaklah linier dan satu arah. Perempuan ternyata berhasil menunjukkan bahwa meskipun dieksklusi dari aktivitas pertambangan *artisanal*, mereka tidaklah sepenuhnya kehilangan peran dalam ekonomi lokal. Mereka justru mereproduksi strategi resistensi sebagai perjuangan kesetaraan gendernya sehingga memungkinkannya untuk tetap dapat terlibat dalam pertambangan. Studi mengenai resistensi perempuan dalam sektor ekonomi informal juga menunjukkan bahwa perempuan pun dapat menjadi agen yang aktif menentang dan merespon norma sosial yang membatasinya (Butler, 2010). Untuk itu, studi ini menggunakan kerangka pikir Michel Foucault dengan metode penelitian kualitatif. Hal ini dianggap mampu menangkap dan menggambarkan keterlibatan perempuan dalam berbagai rangkaian kegiatan di pertambangan, termasuk perannya dalam menentukan keputusan lokasi pengeboran sumur minyak. Studi ini penting dalam menunjukkan narasi bahwa perempuan tetap mempunyai kapasitas menegosiasikan ruang dan perannya, meski mengalami marginalisasi di pertambangan *artisanal*.

Artikel ini mempertanyakan bagaimana narasi sosial yang terinternalisasi menciptakan batasan-batasan gender, serta mengungkap bekerjanya mekanisme kuasa melalui konstruksi sosial mengenai peran perempuan di pertambangan. Selanjutnya, studi ini hendak mengeksplorasi resistansi dan strategi negosiasi perempuan dalam menghadapi eksklusi, serta bagaimana perempuan tetap dapat berkontribusi dalam ekonomi lokal melalui aktivitas pertambangan *artisanal*. Hingga akhirnya studi ini hendak menyoroti potensi perempuan sebagai agen perubahan melalui keterlibatan mereka dalam usaha kecil, mikro, dan menengah (UMKM), serta bagaimana aktivitas ekonomi tersebut turut mengurangi ketimpangan gender sekaligus meningkatkan kesejahteraan keluarga dan komunitas.

### **Metode penelitian**

Studi ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan strategi etnografi. Peneliti *live-in* di kediaman penambang minyak *artisanal* sekitar tiga bulan (Desember 2021 hingga Februari 2022) untuk terlibat langsung dalam proses kehidupan keseharian, baik di rumah tangga, komunitas, maupun arena penambangan minyak *artisanal*. *Dusun Tue* di Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan menjadi lokus studi ini dikarenakan saat penghujung tahun

2021 dan awal 2022 terjadi kejadian beruntun ledakan dan kebakaran di lokasi penambangan minyak *artisanal*. Kejadian tersebut menarik perhatian media massa baik lokal maupun nasional. Informan studi ini adalah berbagai kategori penambang minyak *artisanal*, baik laki-laki maupun perempuan, perangkat desa, maupun petani karet rakyat. Peneliti menggunakan teknik observasi, wawancara mendalam, dan diskusi kelompok terfokus dalam mencari penggalan datanya. Selanjutnya data dilakukan transkrip, koding, dan analisis secara berjenjang.

## Hasil dan Pembahasan

### Eksklusi Perempuan di Pertambangan Minyak *Artisanal*

Masyarakat Dusun Tue awalnya bermata pencaharian sebagai petani karet rakyat. Mereka mengenal pertanian tanaman karet (*hevea brasiliensis*) ini dari kuasa kolonial Belanda. Hal serupa terjadi di sejumlah tempat di Indonesia (Sakai, 2017). Budidaya karet di Indonesia ditujukan untuk memasok kebutuhan pasar dunia, bahkan mencapai hampir setengah pasokan karet dunia (Sakai, 2017). Saat itu Keresidenan Palembang tercatat memproduksi karet sebanyak 58 ton (1921) dan terus meningkat menjadi 10.656 ton (1931). Namun, ketergantungan pada dasar global mengakibatkan harga getah karet pun fluktuatif (1926) dan berlanjut dengan depresi ekonomi dunia (1930).

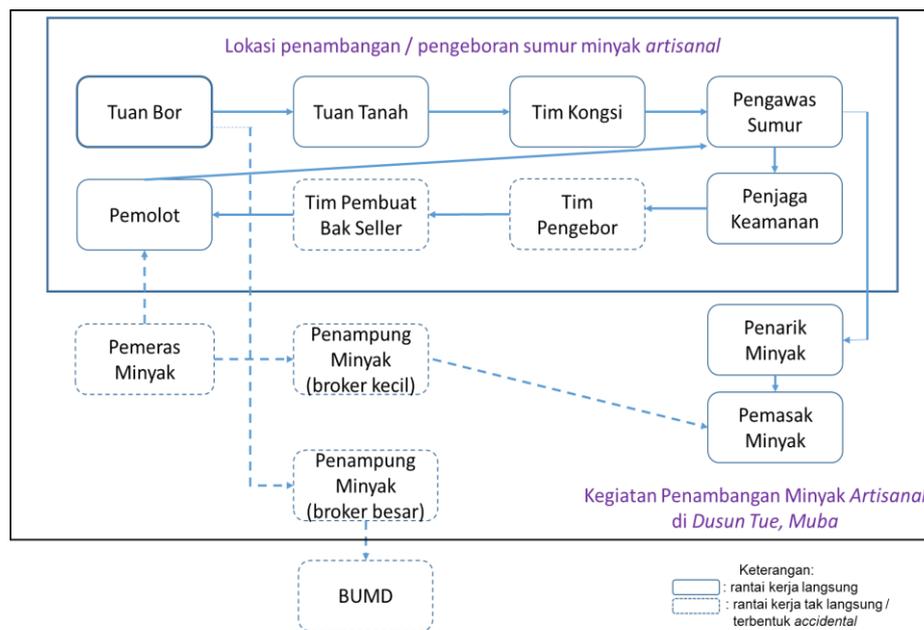
Dalam pertanian karet ini, perempuan berperan penting dan setara dengan laki-laki dalam produksi dan pengelolaan pertanian karet rakyat. Misalnya pekerjaan antara laki-laki dan perempuan tidak mencolok mengenai perbedaan dalam sistem produksi *nyadap* karet. Bahkan perempuan mempunyai posisi tawar karena selain mengurus pekerjaan domestik, mereka pun terlibat dalam mendukung pendapatan ekonomi keluarga. Meskipun di satu sisi mereka para petani sangat tergantung pendapatannya dengan fluktuasi harga getah karet dan tengkulak di tingkat lokal.

Namun, sekitar tahun 2013 harga getah karet turun hingga ke titik terendah mencapai Rp 6.000 per kilogram. Hal ini menjadikan petani tidak mampu menutupi biaya produksi pengolahan getah karet. Di satu sisi, ekspansi pertambangan dan perkebunan pun mulai memasuki ruang-ruang pedesaan. Tidak sedikit diantaranya yang menjual lahan pertanian karet kepada perusahaan. Tergilir dengan pendapatan yang besar secara instan, mengabaikan keberlanjutan mata pencaharian dan identitas dengan wilayah tempatan. Tingkat kriminalitas pun meningkat seiring sulitnya memenuhi kebutuhan.

Berbekal pengetahuan dari praktik penambangan minyak *artisanal* dari desa di sekitarnya, sebagian warga pun mulai membuka sumur minyaknya sendiri. Sebenarnya eksploitasi dan eksplorasi pertambangan minyak ini juga berawal dari kolonial Belanda yang berupaya untuk memenuhi permintaan minyak bumi guna mendukung pertumbuhan industri otomotif dunia (Sakai, 2017). Kota Palembang bahkan menjadi salah satu basis produksi pertambangan minyak bumi terkemuka di Hindia Belanda (1920-1930) dengan mensuplai 60% kebutuhan minyak (Utama, 2021). Sisa-sisa peninggalan eksplorasi Belanda tersebut seperti sumur minyak tua menjadi tanda keberadaan potensi minyak bumi yang selanjutnya dieksplorasi masyarakat sekitar.

Rantai produksi penambangan minyak di *Dusun Tue* berupa pengeboran sumur minyak *artisanal* (*illegal drilling*) dan penyulingan minyak *artisanal* (*illegal refinery*). Masyarakat melakukannya di lahan perkebunan warga atau milik sendiri, bukan wilayah perusahaan atau

pemerintah. Terdapat ratusan sumur minyak *artisanal* di sekitar desa, tetapi jumlahnya fluktuatif dan tidak terdata dikarenakan sifatnya yang informal dan tanpa izin operasional. Pada rantai produksi pengeboran terdapat sejumlah jaringan pekerja, seperti pemilik lahan, pemilik boran, pengebor, pembuat bak seller, pemolot, dan petugas keamanan. Sementara, jaringan pekerjaan di luar lokasi penambangan terdapat penarik minyak, penampung minyak, dan pemasak minyak. Semua jaringan rantai produksi minyak *artisanal* ini umumnya dilakukan oleh laki-laki (lihat Bagan 1.). Di luar rantai produksi tersebut terdapat pekerjaan pinggiran yakni “pemeran” minyak atau pihak yang memulung tumpahan minyak di sekitar lokasi boran atau di pinggiran sungai-sungai kecil. Umumnya pemeran ini dilakukan oleh perempuan.



**Gambar 1.** Rantai produksi penambangan minyak *artisanal* di Dusun Tue, Kab. Muba, Sumsel  
Sumber: Sununianti (2024)

Perubahan mata pencaharian ini turut mengubah dinamika peran gender secara signifikan di pedesaan. Perempuan kian terbatas dilibatkan dalam aktivitas penambangan, bahkan dilarang dan dianggap tabu. Pertambangan dikonstruksi sebagai urusan laki-laki. Hal ini merupakan cermin eksklusi sosial yang dialami perempuan di Dusun Tue. Eksklusi ini disebabkan norma sosial yang berpandangan bahwa perempuan dapat membawa “kesialan” di pertambangan. Bahkan kehadiran perempuan di lokasi penambangan dianggap mengganggu keseimbangan spiritual yang ada. Bahkan kehadiran perempuan di lokasi penambangan dianggap mengganggu keseimbangan spiritual yang ada atau melanggar relasi harmoni antara manusia dan lingkungannya. Akar masalahnya dari mitos atau kepercayaan lokal yang menghubungkan kehadiran perempuan, khususnya saat menstruasi, sebagai simbol ketidakteraturan atau “kotor”, sehingga keberadaannya mengganggu lokasi tambang yang dianggap sebagai ruang “suci” yang perlu dihormati dengan aturan tertentu. Selain itu, masyarakat patriakal cenderung mengonstruksi peran perempuan secara terbatas di ruang domestik, sedangkan ruang kerja keras dan berbahaya seperti tambang dianggap sebagai “dunia laki-laki”. Keberadaan perempuan di ruang ini dianggap sebagai ancaman terhadap norma

gender yang telah mapan. Maka, tabu juga dapat dimaknai sebagai mekanisme mempertahankan dominasi laki-laki di pertambangan dengan membatasi akses perempuan. Inilah gambaran kuasa produktif beroperasi melalui pengetahuan lokal yang menormalkan peran gender dan membatasi akses perempuan ke ruang ekonomi produktif.

Perempuan selain mengalami eksklusi kultural juga mengalami eksklusi dalam pengambilan keputusan terkait penambangan. Perempuan umumnya jarang dilibatkan dalam diskusi terkait persoalan penambangan. Studi ini turut memperkuat stratifikasi gender sekaligus menunjukkan normalisasi kekuasaan yang memposisikan laki-laki sebagai pengambil keputusan yang dominan. Disinilah kuasa bekerja bukan hanya represif, tetapi juga produktif dalam membentuk identitas dan norma sosial (Foucault, 1980).

Eksklusi ini penting dikaji karena memiliki dampak jangka panjang pada kesejahteraan ekonomi perempuan. Ketidakterlibatan perempuan dalam aktivitas ekonomi pertambangan menjadikannya kehilangan akses langsung terhadap sumber pendapatan yang lebih besar. Hal ini akan semakin memperkuat ketergantungan ekonomi pada laki-laki. Sama artinya kian memperburuk ketimpangan gender dalam distribusi keuntungan dan akses terhadap sumber daya penambangan.

### **Strategi Resistensi Sebagai Bentuk Perjuangan Perempuan**

Temuan studi ini menunjukkan bahwa meski perempuan mengalami eksklusi di pertambangan minyak *artisanal*, tetapi perempuan bukanlah objek melainkan subjek yang aktif dan kreatif. Perempuan tidak sepenuhnya menerima marginalisasi tanpa perlawanan. Sejumlah perempuan berstrategi mengembangkan resistensi untuk tetap terlibat dalam ekonomi pertambangan minyak *artisanal*. Mereka memanfaatkan celah-celah ekonomi di pertambangan, meski di tengah larangan.

Salah satu bentuk resistensi yang dilakukan perempuan adalah memulung tumpahan minyak mentah atau “memeras minyak”. Mereka disebut sebagai “pemerah minyak” karena kegiatan mengumpulkan tumpahan minyak tersebut dengan memeras. Kain kelambu, ember, dan jerigen sebagai tempat tampungan minyak adalah properti yang biasa digunakan. Umumnya para perempuan ini pergi ke sekitar lokasi pengeboran dan aliran sungai sekitarnya pagi hari untuk mengambil tumpahan minyak yang tidak terpakai. Aktivitas ini selain berkontribusi bagi ekonomi keluarga, juga turut mencegah kerusakan lingkungan yang lebih luas akibat tumpahan minyak. Perempuan yang bekerja sebagai pemerah mempunyai otoritas diri dan keuangan karena pendapatannya tidak tergantung pada pihak lainnya, melainkan pada kualitas dan kuantitas minyak yang diperolehnya sendiri. Pendapatannya pun bisa langsung diperoleh saat itu juga setelah penjualan minyak mentah kepada pengepul. Ibu Pelangi bercerita pernah mendapatkan lima jerigen dalam sehari, tetapi ada juga pemerah lainnya bisa mendapatkan sepuluh jerigen minyak. Harga minyak bervariasi tergantung kualitas minyaknya, mulai Rp 30.000 hingga Rp 100.000 untuk satu jerigen.

Strategi resistensi lainnya dari para perempuan adalah dengan menjadi “*pemolot*”. *Pemolot* adalah istilah lokal bagi pekerja yang bertugas menarik minyak dari dalam perut bumi ke permukaan tanah dengan menggunakan bantuan tenaga motor statis. Untuk itu, tidak banyak perempuan yang bekerja sebagai pemolot dikarenakan dibutuhkan persyaratan keterampilan khusus, yakni dapat mengoperasikan motor. Tidak banyak perempuan yang bekerja sebagai pemolot dikarenakan dibutuhkan persyaratan keterampilan dapat mengoperasikan

motor statis dalam mengangkat atau menarik minyak dari dalam perut bumi ke permukaan. Sama seperti pemeras, pemolot juga mempunyai otoritas atas pekerjaan dan penghasilannya. Mereka diberi kebebasan dalam bekerja oleh pemilik sumur minyaknya. Akan tetapi, penghasilannya baru dapat diperoleh jika telah mengumpulkan setidaknya satu drum minyak yang dibayar Rp 100.000,- per drum.



**Gambar 2.** Kegiatan Memeras Minyak  
Sumber: Sununianti (2024)

Perempuan juga terlibat di kegiatan *kongsi* penambangan. Keterlibatan perempuan sebagai pengelola keuangan produksi penambangan merupakan bentuk resistensi aktifnya yang tidak secara langsung bekerja di lokasi penambangan. Selain itu, keterlibatan dalam menentukan titik lokasi pengeboran sumur minyak melalui ritual “meniduri tanah” menjadi hal penting perlu dipertimbangkan. Bahkan, para *toke* atau orang kepercayaan dan kaya di desa dan para penambang mempercayai bahwa keberhasilannya dalam menambang adalah berkat doa dari para istri, janda, anak miskin, dan yatim piatu. Untuk itu, penghargaan pada pengetahuan lokal dan peran perempuan menjadi salah satu strategi resistansi untuk bernegosiasi dan memainkan peran penting perempuan dalam ekonomi penambangan. Studi ini hendak menunjukkan bahwa kuasa tidak pernah mutlak, melainkan selalu ada ruang bagi individu, termasuk kelompok terpinggirkan, untuk melawan dan menegosiasikan kepentingan dalam struktur sosialnya.

### **Peran Perempuan dalam Pemberdayaan Ekonomi**

Meskipun perempuan terpinggirkan dalam pertambangan, tetapi mereka aktif mengembangkan sejumlah usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang berkaitan dengan kegiatan penambangan. Perempuan mampu berperan dalam pemberdayaan ekonomi lokal melalui penyediaan berbagai kebutuhan dasar para penambang. Misalnya, terdapat sejumlah bangunan warung sederhana di pinggiran jalan sekitar lokasi penambangan yang menjual aneka makanan ataupun alat perlengkapan lainnya. Beberapa diantaranya juga mendirikan bangunan untuk dikontrakan bagi para buruh penambangan. Bahkan, kelompok perempuan berhasil mendirikan produksi makanan ringan yang selanjutnya menjadi bagian dari kegiatan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Sejumlah usaha tersebut telah turut membantu para perempuan untuk mandiri secara ekonomi serta memberi kontribusi bagi pengembangan ekonomi komunitas dengan lebih luas. Selain memberi sumber pendapatan penting bagi keluarganya, kegiatan ekonomi tersebut juga

membangun jaringan bagi perempuan lain di komunitas. Perempuan juga umumnya berbagi sumber daya dan bekerjasama dengan perempuan lainnya melalui pengembangan usaha ekonominya. Kegiatan ini pun menjadi sarana pembangunan dan pengembangan solidaritas sosial. Perempuan menjadi berdaya tidak hanya untuk diri sendiri dan keluarga, tetapi juga komunitas dan desa. Dalam hal ini, UMKM telah berfungsi sebagai alat pengembangan dan pemberdayaan perempuan yang perlu diperhitungkan di hadapan ketimpangan gender di pertambangan.

Akan tetapi, peran perempuan mengembangkan UMKM bukan tanpa hambatan. Umumnya kendala yang dihadapi terkait akses modal, keterampilan, dan pasar. Para perempuan kesulitan mendapat pinjaman modal karena kendala administrasi, infrastruktur, dan birokrasi. Keterbatasan pendidikan dan keterampilan juga turut menyertai dalam mengakses pasar yang tepat. Studi ini menunjukkan bahwa UMKM telah berfungsi sebagai sarana pemberdayaan perempuan, akan tetapi prosesnya telah mengalami hambatan struktur ekonomi yang kurang ramah pada perempuan. Hal ini sebagai wujud transformasi sosial dalam memberikan ruang bagi perempuan untuk berpartisipasi dalam ekonomi lokal secara mandiri.

### **Relasi Kuasa Gender dalam Distribusi Keuntungan Ekonomi**

Temuan menunjukkan terjadinya ketimpangan distribusi ekonomi antara laki-laki dan perempuan yang terus direproduksi di pertambangan minyak *artisanal*. Hasil observasi dan wawancara memperlihatkan keterlibatan perempuan dalam berbagai aspek ekonomi di pertambangan. Akan tetapi, keuntungan dominan tetap jatuh pada pihak laki-laki. Laki-laki cenderung mendapatkan pendapatan lebih besar dibandingkan perempuan. Misalnya saja, penarik minyak bisa mendapatkan keuntungan bersih mencapai Rp 1 juta setiap kali perjalanan. Hal ini sejalan dengan anggapan bahwa perempuan cenderung berada di posisi ekonomi sekunder.

Selain ketimpangan distribusi pendapatan, ketimpangan di pertambangan juga tampak dari akses terhadap hak kepemilikan tambang. Tambang umumnya dimiliki laki-laki dalam setiap rantai produksi, sedangkan perempuan berperan sebagai pendukung. Meskipun sebagian kecil perempuan terlibat dalam *kongsi* pertambangan, tetapi jarang mempunyai akses langsung terhadap keuntungan besar dan hak atas produksi pertambangan minyak *artisanal*.

Meskipun pertambangan ini didominasi laki-laki, tetapi praktik ekonomi turunan dari pertambangan ini turut memberikan alternatif bagi perempuan agar tetap berkontribusi dalam kehidupan keluarga dan komunitas. Hal ini adalah bentuk pemberdayaan ekonomi yang memberikan kesempatan perempuan untuk mengurangi ketergantungannya pada laki-laki dari sektor pertambangan. Selain itu, perempuan yang mengalami marginalisasi ternyata mampu menjadi agensi yang mereproduksi kuasa dan resistansi secara kreatif. Studi ini melengkapi produksi resistensi di pertambangan minyak *artisanal* melalui negosiasi yang cenderung didominasi laki-laki (Sununianti et al., 2024). Penting melihat relasi kuasa gender secara dinamis serta negosiasi dan resistensi atas ketimpangan struktural yang terjadi.

Studi ini menunjukkan bahwa subjek yang cenderung berada di tepian pertambangan ternyata juga mengalami subjektivitas. Umumnya perempuan menjadi objek dalam diskursus pertambangan dan cenderung berada di ranah domestik. Sementara laki-laki menguasai berbagai kegiatan produktif guna mendapatkan penghasilan. Penambangan telah menciptakan

pembagian dan hierarki gender melalui pembatasan simbolik dalam kapitalisme (Buu-Sao, 2020). Namun, subjek perempuan dalam studi ini produktif dalam mengonstruksi dirinya. Mereka tidak seutuhnya melawan konstruksi budaya, tetapi menegosiasikan posisi dan kepentingannya. Sebagian diantaranya bekerja di bagian pinggiran pertambangan juga dalam *kongsi* menambang. Perempuan telah berupaya meningkatkan kapasitas dirinya serta membangun kesadaran kelompok perempuan, sehingga mempunyai posisi tawar dan penentu keputusan.

Studi pembangunan cenderung memandang alam dan perempuan sebagai “yang lain” dengan unsur non-jiwa yang pasif. Bagi Vandana Shiva (1997) pembangunan dipaksakan di negara Selatan sebagai refleksi paradigma patriarki yang sangat reduksionis dengan dasar ilmu pengetahuan modern yang menguniversalkan, bebas nilai, dan objektif. Hal ini justru menghasilkan krisis ekologi, ekonomi, serta ketimpangan gender. Kekerasan pun terjadi pada alam sebagai objek pengetahuan, pada perempuan sebagai subjek yang tidak berpengetahuan, juga represi pengetahuan melalui pola tunggal yang sah yang secara rasional lebih tinggi dibandingkan pola pengetahuan alternatif. Padahal, tidak ada fakta tentang alam yang netral atau bebas nilai dalam kaitan kegiatan ekonomi dan kognitif. Pandangan dunia Utara kontemporer mengenai alam cenderung dengan konsep Cartesian, lingkungan dianggap terpisah dari manusia. Implikasinya terjadi dualisme atau dikotomi antara manusia dan alam. Dalam hal ini, pembangunan telah menyimpang dan terjadi proses pelanggaran terhadap alam dan perempuan.

Akan tetapi praktiknya, perempuan dalam studi ini bukan hanya menjadi korban dari pembangunan. Ia justru mampu memunculkan diri dengan mengambil peran dan menciptakan narasi tandingan dengan “menjadi” unsur penting dalam praktik penambangan, maupun menghentikan krisis lingkungan. Perempuan bukan hendak menuntut kesamaan dalam hal pekerjaan, seperti halnya feminis liberal. Akan tetapi, ia menyuarakan untuk terjadinya pembagian peran baik di rumah tangga maupun di pertambangan. Perempuan mempunyai posisi tawar dalam pertambangan untuk menegosiasikan kebutuhan, keselamatan sesama, juga dampak bagi lingkungan. Kesadaran ini tumbuh karena mereka mempunyai pengetahuan tentang makna menjadi korban suatu kemajuan, serta pihak yang menanggung biaya dan beban. Mereka pula mempunyai pengetahuan lingkungan tentang produksi dan perlindungan kehidupan. Misalnya, perempuan menjadi “garda depan” saat kehidupan bertumpu pada pertanian karet. Tetapi kisah perjuangannya tidak berhenti saat tersingkir dari perkebunan dan pertambangan.

## **Kesimpulan**

Studi ini menunjukkan norma sosial yang menentukan peran gender turut menciptakan marginalisasi perempuan dari ruang produktif pertambang minyak *artisanal*. Peralihan mata pencaharian dari pertanian karet rakyat ke pertambang minyak *artisanal* telah turut menggeser ekonomi lokal dan peran gender. Meskipun perempuan masih memainkan peran penting dalam kehidupan desa, norma-norma tradisional yang menganggap kehadiran perempuan di lokasi pertambangan dianggap sebagai tabu atau hal yang tidak menyenangkan guna menyingkirkan mereka dari ruang ekonomi formal.

Akan tetapi, eksklusi ini tidak selalu mutlak dalam konteks kerangka kuasa Foucault. Meskipun perempuan umumnya terpinggirkan dari ruang pertambangan, tetapi mereka berhasil

mengungkapkan berbagai bentuk partisipasi. Aktivitas memulung minyak, terlibat dalam kongsi menambang, berperan penting dalam menentukan lokasi pengeboran, hingga membangun usaha mikro, kecil, dan menengah merupakan wujud adaptasinya terhadap pengekangan struktur kuasa yang ada. Untuk sementara, para perempuan telah berhasil membangun strategi resistansi sebagai perjuangan kesetaraan gender melalui bentuk yang aktif dan kreatif dalam mendukung perekonomian lokal. Hal ini gambaran kuasa gender yang dinamis dan terus direproduksi dan dinegosiasikan. Studi ini menunjukkan bahwa meski terjadi ketimpangan gender, tetapi perempuan di *Dusun Tue* mampu menunjukkan agensi mereka dalam menghadapi norma-norma sosial dengan secara kreatif menciptakan ruang pemberdayaan di arena lingkungan maskulinitas.

Secara teoretis, studi ini memperkaya pemahaman relasi kuasa berbasis gender di pertambangan minyak *artisanal*. Dalam perspektif Foucault, kuasa dalam studi ini tidak hanya sebagai kekuatan yang menekan, tetapi juga kekuasaan produktif yang mampu menciptakan norma dan aturan yang membentuk identitas sosial. Mekanisme kuasa beroperasi melalui norma sosial dalam mengatur ruang dan peran gender di masyarakat telah turut mengeksklusi perempuan di sektor pertambangan.

Secara praktis, studi berkontribusi memberikan analisis perjuangan kesetaraan gender di pertambangan minyak *artisanal*. Studi ini menawarkan wawasan akan pentingnya mempertimbangkan dimensi gender dalam pengelolaan sumber daya alam, khususnya di pertambangan *artisanal*. Kebijakan perlu mempertimbangkan norma sosial dan relasi kuasa yang mempengaruhi akses perempuan terhadap sumber daya ekonomi. Perlu sejumlah upaya untuk mengurangi ketimpangan gender dalam distribusi keuntungan ekonomi yang mencakup sejumlah strategi dalam meningkatkan akses perempuan terhadap sumber daya formal, seperti modal usaha. Selain itu, penting bagi pembuat kebijakan untuk lebih memikirkan kembali upaya formalisasi dalam intervensi dan perjuangan perempuan di pertambangan.

## Daftar Pustaka

- Andrews, N. (2015). Digging for survival and/or justice? The drivers of illegal mining activities in Western Ghana. *Africa Today*, 62(2), 3–24.
- Arthur-Holmes, F. (2021). Gendered Division of Labour and “Sympathy” in Artisanal and Small-scale Gold Mining in Prestea-Huni Valley Municipality, Ghana. *Journal of Rural Studies*, 81, 358–362. <https://doi.org/10.1016/j.jrurstud.2020.11.001>
- Banchirigah, S. M. (2008). Challenges With Eradicating Illegal Mining In Ghana: A perspective from the grassroots. *Resources Policy*, 33(1), 29–38. <https://doi.org/10.1016/j.resourpol.2007.11.001>
- Bansah, K. J., Kansake, B. A., Assan, E., & Bekui, P. (2018). Socioeconomic And Environmental Assessment Of Informal Artisanal And Small-Scale Mining In Ghana. *Journal of Cleaner Production*. <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2018.08.150>
- Brata, N. T. (2018). Social Conflict And Military Roles In Public Oil Mining In Bojonegoro. *MIMBAR*, 34(1), 195–203. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.29313/mimbar.v34i1.3330.195-203>
- Buss, D. (2019). Gender And Artisanal And Small-Scale Mining: Implications For Formalization. *Extractive Industries and Society*, 6(4), 1101–1112. <https://doi.org/10.1016/j.exis.2019.10.010>

- Butler, J. (2010). Performative Agency. *Journal of Cultural Economy*, 3(2), 147–161. <https://doi.org/10.1080/17530350.2010.494117>
- Buu-Sao, D. (2020). Extractive Governmentality At Work: Native Appropriations Of Oil Labor In The Amazon. *International Political Sociology*, 15(1), 63–82. <https://doi.org/10.1093/ips/olaa019>
- Buxton, A. (2013). *Responding to the challenge of artisanal and small-scale mining: How can knowledge networks help?* (Issue London). IIED. <http://pubs.iied.org/16532IIED.htm>
- Danielsen, K., & Hinton, J. (2020). A Social Relations of Gender Analysis of Artisanal and Small-scale Mining in Africa's Great Lakes Region. *Canadian Journal of African Studies*, 54(1), 17–36. <https://doi.org/10.1080/00083968.2019.1676807>
- Foucault, M. (1980). *Power / Knowledge: Selected interviews and other writings 1972-1977* (C. Gordon (ed.)). Pantheon Books.
- Hilson, G., & Maconachie, R. (2020). Artisanal And Small-Scale Mining And The Sustainable Development Goals: Opportunities And New Directions For Sub-Saharan Africa. *Geoforum*, 111, 125–141. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.geoforum.2019.09.006>
- Hilson, G., & Potter, C. (2003). Why Is Illegal Gold Mining Activity so Ubiquitous in Rural Ghana? *African Development Review*, 15(2–3), 237–270. <https://doi.org/https://doi.org/10.1111/j.1467-8268.2003.00073.x>
- Ibrahim, A. F., Rutherford, B., & Buss, D. (2020). Gendered “Choices” in Sierra Leone: Women in Artisanal Mining in Tonkolili District. *Canadian Journal of African Studies*, 54(1), 157–176. <https://doi.org/10.1080/00083968.2019.1671207>
- Lahiri-Dutt, K. (2005). Researching The Livelihood Strategies Of Artisanal And Small-Scale Miners In India And Other Countries of South Asia: Some lessons from the field. In *Philippines Learning Event of CASM Asia Pacific, Organised by RMAP, ANU and Philippines Sustainable Development Network, Asian Institute of Management, Baguio City, Manila*.
- Lahiri-Dutt, K. (2007). Illegal coal mining in Eastern India: Rethinking Legitimacy And Limits Of Justice. *Economic & Political Weekly*, 42(49), 57–66.
- Lahiri-Dutt, K. (2011). The Megaproject Of Mining : A Feminist Critique. *Engineering Earth, March*. <https://doi.org/10.1007/978-90-481-9920-4>
- Lahiri-Dutt, K. (2018). Extractive Peasants: Reframing Informal Artisanal And Small-Scale Mining Debates. *Third World Quarterly*, 39(8), 1561–1582. <https://doi.org/10.1080/01436597.2018.1458300>
- Lahiri-Dutt, K., Alexander, K., & Insouvanh, C. (2014). Informal Mining In Livelihood Diversification Mineral Dependence And Rural Communities In Lao PDR. *South East Asia Research*, 22, 103–122. <https://doi.org/10.5367/sear.2014.0194>
- Lahiri-Dutt, K., Miller, M., Hickey, M., Anwar, N., Marolt, P., Lysaght, T., Prematillak, T., Bunnell, T., & Yeo, V. (2014). *Extracting peasants from the fields: Rushing for a livelihood?* (216; Issue 216).
- Macdonald, K., Lund, M., Blanchette, M., & McCullough, C. (2014). Regulation Of Artisanal Small Scale Gold Mining (ASGM) In Ghana And Indonesia As Currently Implemented Fails To Adequately Protect Aquatic Ecosystems. In Sui, Sun, & Wang (Eds.), *An Interdisciplinary Response to Mine Water Challenges* (pp. 401–405). China University

- of Mining and Technology Press. <http://ro.ecu.edu.au/ecuworkspost2013/863/>
- Moretti, D. (2006). The Gender Of The Gold: An Ethnographic And Historical Account Of Women's Involvement In Artisanal And Small-Scale Mining In Mount Kaindi, Papua New Guinea. *Oceania*, 76(2), 133–149. <https://doi.org/10.1002/j.1834-4461.2006.tb03041.x>
- Sakai, M. (2017). *Kacang tidak lupa kulitnya: Identitas Gumay, Islam, dan merantau di Sumatera Selatan*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Shiva, V. (1997). *Bebas dari pembangunan: Perempuan, ekologi dan perjuangan hidup di India*. Yayasan Obor Indonesia bekerjasama dengan KONPHALINDO.
- Spiegel, S. J. (2012). Governance Institutions, Resource Rights Regimes, And The Informal Mining Sector: Regulatory complexities in Indonesia. *World Development*, 40(1), 189–205. <https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2011.05.015>
- Sununianti, V. V. (2024). *Uang Minyak: Kuasa Dan Resistansi Pertambangan Minyak Artisanal Di Sumatera Selatan*. Universitas Gadjah Mada.
- Sununianti, V. V., & Nugroho, H. (2023a). Artificial Intelligence And Machine Learning In Governmental Artisanal Mining: Current Status, Development, And Future Directions. *The Eurasia Proceedings of Educational & Social Sciences (EPESS)*.
- (2023b). Bibliometric Insights Into Agriculture And Artisanal Mining In Rural Communities. *International Journal of Educational Research & Social Sciences*, 4(2), 360–369. <https://doi.org/DOI>: <https://doi.org/10.51601/ijersc.v4i2.623>
- Sununianti, V. V., Sujito, A., & Nugroho, H. (2024). Governing the (Dis)order: Toke And The Convergence Of Artisanal Oil Mining And State Visibility In Sumur Baru. *Forest and Society*, 8(1), 41–60. <https://doi.org/10.24259/fs.v8i1.26313>
- Utama, N. J. (2021). *Pertempuran Palembang: Pertempuran lima hari lima malam 1947*. Matapadi.
- Utoyo, M. (2018). Local Government And Illegal Drilling. *Advances in Economics, Business and Management Research*, 59(International Conference on Energy and Mining Law (ICEML)), 204–207. <https://doi.org/10.2991/iceml-18.2018.45>
- Wagner, L. (2016). *Organized Crime And Illegally Mined Gold In Latin America* (Issue April). [www.GlobalInitiative.net](http://www.GlobalInitiative.net)
- Yankson, P. W. K. (2019). Gold in Ghana: The Effects Of Changes In Large-Scale Mining On Artisanal And Small-Scale Mining (ASM). *Extractive Industries and Society*, 6(1), 120–128. <https://doi.org/10.1016/j.exis.2018.09.009>